154.500.000

Rp.





PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 November 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAFARUDDIN SITOMPUL

2. Jabatan : **KEPALA SATGAS POL. PP KEC. CAKUNG**

3. NHK : **926915**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.460.000.000

1. Tanah Seluas 60 m2 di KAB / KOTA BEKASI, Rp. 110.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 48 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , Rp. 150.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 38 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 554 m2/554 m2 di KAB / KOTA KOTA

JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1. MOBIL, TOYOTA RUSH / MICRO / MINIBUS Tahun 2016, HASIL

SENDIRI Rp. 140.000.000

2. MOTOR, HONDA H1B02N42L0 AIT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

3. MOTOR, HONDA 01B02N12L2AIT Tahun 2019, HASIL SENDIRI

Rp. 5.500.000

| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | | | Rp. | 7.500.000 |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|-----|---------------|
| D. SURAT BERHARGA | - No | OK. | Rp. | at at |
| E. KAS DAN SETARA KAS | | | Rp. | 20.087.949 |
| F. HARTA LAINNYA | al. | al. | Rp. | al al |
| Sub Total | KPI | KPA | Rp. | 1.642.087.949 |
| III. HUTANG | | | Rp. | 172.314.940 |
| IV. TOTAL H <mark>A</mark> RTA KEKA <mark>Y</mark> AAN (II-III) | KPK- | KPK. | Rp. | 1.469.773.009 |
| | | | | |

Catatan:

^{1.} Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.





Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

